

BPKH *News*

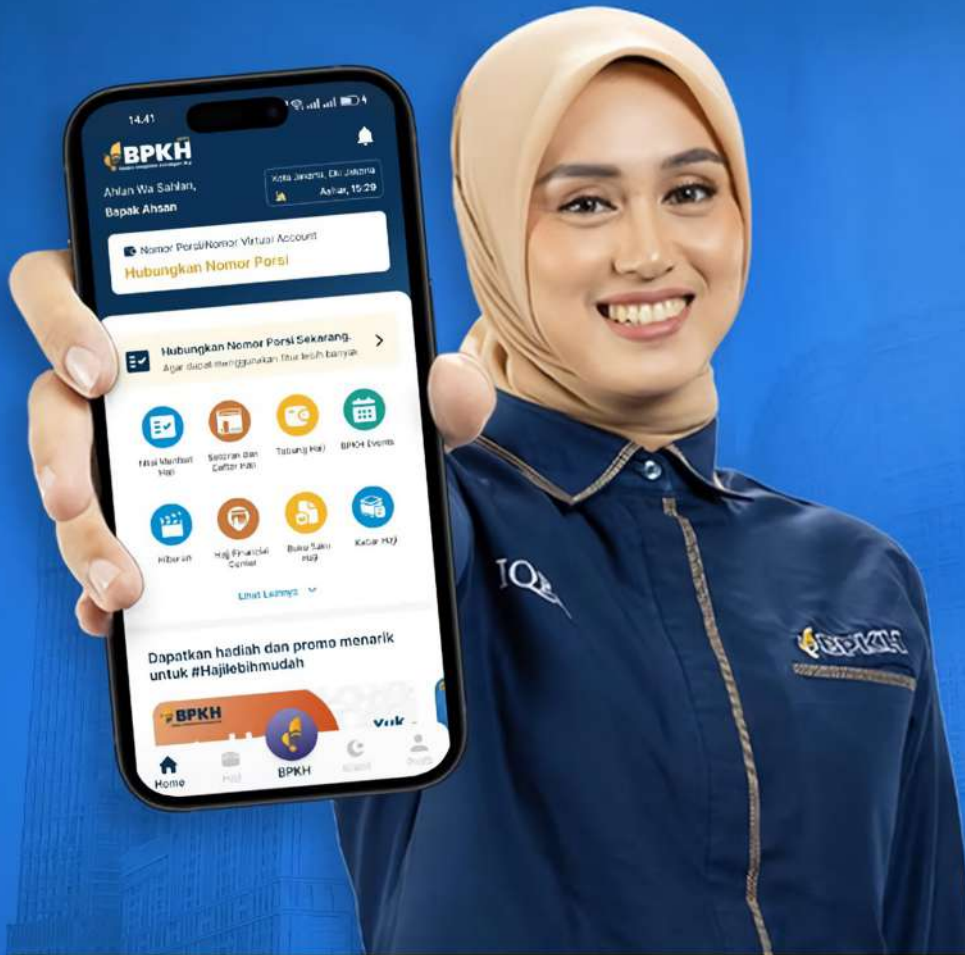
**DPR Sahkan Revisi
UU Keuangan Haji**
Hal 12

Panggilan dari Arafah
Hal 18

**BPKH Perluas
Jaringan Global**
Hal 26

**Transformasi Pengelolaan
Dana Haji Indonesia:
Dari Sistem Syekh
hingga Manajemen
Aset Modern**
Hal 40

**MELAYANI DI TANAH SUCI
MENGHADIRKAN MANFAAT
UNTUK NEGERI**



Mau Tahu Estimasi Keberangkatanmu?

Cek estimasi keberangkatan dan nilai manfaat langsung di BPKH Apps.
Satu aplikasi untuk kelola rencana ibadah haji dengan mudah dan transparan.

BPKH Apps



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,



PELINDUNG

Fadlul Imansyah,
Kepala Badan Pelaksana BPKH RI
Ahmad Zaky,
Sekretaris Badan BPKH RI

PENANGGUNG JAWAB

Demmy R Budiawan,
Kepala Divisi Komunikasi Strategis
BPKH RI

PEMIMPIN REDAKSI

Ricki Syahroni Putra,
Manajer Komunikasi Strategis BPKH RI

STAF REDAKSI

Yusuf Kadhafi

ALAMAT REDAKSI

Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18,
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12940

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga BPKH News Edisi 16 Tahun 2026 sebagai media informasi dan literasi yang menghubungkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan masyarakat luas.

Edisi kali ini hadir di tengah momentum penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang sarat dengan dinamika, harapan, dan ikhtiar bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta tata kelola keuangan haji yang semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan. Berbagai capaian, inovasi, serta langkah strategis BPKH kami sajikan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus komitmen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi jemaah dan umat.

Melalui berbagai rubrik yang tersaji, pembaca dapat mengikuti perkembangan pengelolaan dana haji, penguatan regulasi, transformasi digital, perluasan jejaring internasional, hingga berbagai program kemaslahatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Edisi ini juga menampilkan beragam perspektif dan gagasan yang diharapkan dapat memperkaya pemahaman publik mengenai pentingnya tata kelola dana haji yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Kami meyakini bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya menjaga dan mengembangkan dana umat, tetapi juga membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi, inovasi yang berkelanjutan, serta pelayanan yang semakin memberikan nilai tambah bagi para jemaah. Oleh karena itu, kehadiran BPKH News menjadi bagian dari upaya kami untuk terus memperkuat literasi publik sekaligus menghadirkan ruang dialog yang konstruktif mengenai pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan edisi ini. Semoga setiap informasi yang tersaji dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta semakin menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Selamat membaca.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam hangat, Tim Redaksi*



DPR SAHKAN REVISI UU KEUANGAN HAJI, PERKUAT PERAN BPKH BAGI JEMAAH

12

DANA HAJI DIKELOLA OPTIMAL



14



PANGGILAN DARI ARAFAH

18

BPKH HADIRKAN RASA TENANG BAGI JAMAAH LEWAT PENYALURAN LIVING COST 04

PENGELOLAAN DANA HAJI MAKIN KUAT, TRANSPARANSI KIAN DIPERTEGAS 08

BPKH RAIH DIGITAL INNOVATION AWARDS 2026, PERKUAT TRANSFORMASI DIGITAL PENGELOLAAN DANA HAJI 06

BPKH PERKUAT TRANSFORMASI DIGITAL EKOSISTEM HAJI DAN UMRAH MELALUI PARTISIPASI DI INTERNATIONAL ISLAMIC EXPO 2026 10

APRESIASI KARYA UNTUK LITERASI HAJI 07

LENSA UMAT 16

20 MENJAGA STANDAR BMI SEBAGAI BANK PERTAMA MURNI SYARIAH YANG MODERN



Bank Muamalat

24 MENYAPA CALON JEMAAH DENGAN LITERASI KEUANGAN HAJI DAN SINERGI ANAK USAHA



LITERASI KEUANGAN HAJI

26 BPKH PERLUAS JEJARING GLOBAL



INSEA

32 BPKH SALURKAN BANTUAN RENOVASI FASILITAS ASRAMA HAJI EMBARKASI SURABAYA UNTUK KENYAMANAN DAN KESELAMATAN JEMAAH



28 MENJAGA DANA HAJI



33 DARI HUNIAN KE KEMANDIRIAN, BPKH BANGUN EKONOMI PRODUKTIF DI KAMPUNG HAJI SIGI



34 DANA ABADI UMAT HADIRKAN KENYAMANAN BAGI JEMAAH HAJI SUMATERA UTARA



36 SERBA-SERBI QURBAN



35 MENEBAR KEBAIKAN HINGGA PELOSOK NEGERI



BPKH PROGRAM

38 MEMAHAMI DAM DALAM IBADAH HAJI



40 TRANSFORMASI PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA: DARI SISTEM SYEKH HINGGA MANAJEMEN ASET MODERN





BPKH HADIRKAN RASA TENANG BAGI JEMAAH HAJI LEWAT PENYALURAN LIVING COST

Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan spiritual para jemaah, tetapi juga dukungan layanan yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman sejak sebelum keberangkatan. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran living cost atau biaya hidup kepada jemaah haji Indonesia, yang menjadi bagian dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pada musim haji 1447 H/2026 M, setiap jemaah haji Indonesia menerima 750 Riyal Arab Saudi (SAR) sebagai uang saku yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama berada di Tanah Suci, termasuk untuk pembayaran DAM (denda haji) apabila diperlukan. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai embarkasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rangkaian pelayanan

sebelum keberangkatan.

Di Embarkasi Solo, misalnya, Jemaah Calon Haji Kloter 6 asal Brebes tiba di Asrama Haji Donohudan untuk menjalani berbagai tahapan persiapan

keberangkatan. Setibanya di embarkasi, para jemaah langsung mengikuti layanan terpadu yang mencakup pemeriksaan kesehatan, verifikasi data, pemasangan gelang identitas, pengecekan dokumen Nusuk, hingga penerimaan *living cost*. Seluruh proses berlangsung tertib, lancar, dan kondusif, dengan petugas memastikan setiap jemaah menerima haknya secara tepat.

Pola pelayanan serupa juga diterapkan melalui skema *One Stop Service* di berbagai embarkasi. Melalui sistem ini, seluruh proses pelayanan dilakukan secara terintegrasi dalam satu lokasi sehingga memudahkan jemaah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan persiapan keberangkatan secara lebih efisien.





Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati, menjelaskan bahwa penyaluran *living cost* merupakan salah satu wujud nyata manfaat yang diterima jemaah dari hasil pengelolaan dana haji.

"BPKH diamanahkan untuk mengelola keuangan haji, dan dana haji terus tumbuh. Pada tahun 2025, BPKH memperoleh nilai manfaat sekitar Rp12 triliun dengan dana kelolaan mencapai Rp180 triliun. Nilai manfaat tersebut didistribusikan kepada jemaah tunggu maupun jemaah yang berangkat. Selain itu, jemaah juga mendapatkan uang saku atau *living cost* sebesar 750 Riyal Arab Saudi yang dapat digunakan sebagai bekal operasional selama berada di Tanah Suci."

Hal senada disampaikan Anggota Badan Pelaksana BPKH, Hary Alexander, yang menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan dana haji bukan hanya menjaga nilai dana secara aman dan profesional, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat kembali dirasakan langsung oleh para jemaah.

"BPKH memastikan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji dapat

kembali kepada jemaah, salah satunya melalui pemberian biaya hidup yang mendukung kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci."

Bagi para jemaah, manfaat tersebut dirasakan secara nyata. Hardiyanto, salah seorang jemaah dari Embarkasi Solo, mengungkapkan bahwa uang saku yang diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan selama menjalankan ibadah.

"Sangat membantu kami, terutama untuk membayar DAM dan sebagai pegangan selama berada di Arab Saudi."

Penyaluran *living cost* merupakan bagian dari sinergi antara BPKH dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang semakin terintegrasi. Kolaborasi tersebut tidak hanya mencakup aspek pembiayaan, tetapi juga menghadirkan sistem pelayanan yang memudahkan jemaah sejak proses embarkasi hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Sebagai lembaga yang mengelola dana haji umat, BPKH terus berkomitmen menjalankan amanah secara profesional, transparan,

dan sesuai prinsip syariah. Melalui optimalisasi nilai manfaat dana haji, BPKH menghadirkan dukungan nyata bagi jemaah, sehingga mereka dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lebih tenang, nyaman, dan khusyuk.



BPKH RAIH DIGITAL INNOVATION AWARDS 2026, PERKUAT TRANSFORMASI DIGITAL PENGELOLAAN DANA HAJI

Komitmen Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam memperkuat tata kelola dana haji berbasis teknologi digital kembali mendapat pengakuan. BPKH meraih penghargaan Digital Innovation in Public Service pada ajang Digital Innovation Awards (DIA) 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan BPKH menghadirkan inovasi digital dalam pengelolaan dana haji yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam ajang ini, BPKH dinobatkan sebagai penerima penghargaan pada kategori

pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi sekaligus memperkuat sistem pelaporan kepada masyarakat.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi BPKH untuk terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan dana haji.

“Penghargaan ini memotivasi BPKH untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memperkuat tata kelola keuangan haji yang modern, transparan, dan terpercaya.”

Excellence in Sementara itu, Anggota Badan Digital Financial Pelaksana BPKH Bidang Penghimpunan Management dan Teknologi Informasi, Harry Alexander, menegaskan bahwa Funds, melalui penguatan teknologi informasi

merupakan bagian dari strategi BPKH dalam meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa transformasi digital telah menjadi salah satu fondasi penting dalam pengelolaan dana haji. Ke depan, BPKH berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi berbasis teknologi guna menghadirkan tata kelola yang semakin profesional, amanah, dan berkelanjutan, sehingga manfaat pengelolaan dana haji dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh jemaah haji Indonesia.



Anugerah
Jurnalistik
BPKH 2026

LOMBA KARYA JURNALISTIK

KONTEN VIDEO KREATIF

Total Hadiah

120 JT

@bpkhri | @bpkhri | BPKH RI - bpkh.go.id



APRESIASI KARYA UNTUK LITERASI HAJI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi mengumumkan para pemenang Anugerah Jurnalistik BPKH (AJ BPKH) 2026 Periode I. Program ini menjadi bentuk apresiasi BPKH kepada insan pers dan kreator konten yang telah berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tahun ini, AJ BPKH diikuti oleh 165 peserta dari berbagai daerah. Seluruh karya yang masuk melalui proses seleksi dan penilaian oleh dewan juri independen yang terdiri dari profesional media dan praktisi komunikasi.

Mengusung tema “Kinerja Keuangan Haji, Dana Terjaga, Manfaat Terasa” dan “Manfaat Pengelolaan Dana Haji untuk Haji Indonesia”, ajang ini mendorong lahirnya karya jurnalistik

dan konten kreatif yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat pengelolaan dana haji bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Kepala Badan Pelaksana BPKH menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menghasilkan karya-karya berkualitas. Menurutnya, AJ BPKH merupakan wujud penghargaan atas dedikasi insan pers dan kreator konten dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan konstruktif bagi masyarakat. Melalui karya-karya tersebut, literasi publik mengenai pengelolaan keuangan haji dapat terus diperkuat.

Pada kategori Artikel Jurnalistik, Juara I diraih oleh Rilo Pambudi, disusul Arianda Tanjung sebagai Juara II dan Adi Manggala Saputro sebagai Juara III. Sementara pada kategori Video

Kreatif, Juara I diraih oleh Sahdi Tamamunni’am, Juara II Abdul Wahid Shafauzadi, dan Juara III Pratiwi Kusumastuti.

Melalui penyelenggaraan AJ BPKH 2026, BPKH berharap sinergi dengan media dan para kreator konten terus berkembang dalam mendukung penyebaran informasi yang berkualitas mengenai pengelolaan dana haji. Ajang ini juga menjadi bagian dari komitmen BPKH untuk mendorong keterbukaan informasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan haji nasional.

Selamat kepada seluruh pemenang. Semoga karya-karya yang dihasilkan dapat terus memberikan kontribusi positif bagi peningkatan literasi publik dan penguatan ekosistem informasi yang kredibel bagi masyarakat Indonesia.





PENGELOLAAN DANA HAJI MAKIN KUAT, TRANSPARANSI KIAN DIPERTEGAS

Melalui rangkaian BPKH Connect yang digelar di berbagai daerah sepanjang Mei hingga Juni 2026, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola dana haji. Mulai dari penguatan regulasi, edukasi publik mengenai pengelolaan dana haji, hingga transparansi investasi,

seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat dana haji dapat dirasakan secara optimal oleh jemaah.

Dalam BPKH Connect di Bandung, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyambut positif persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif DPR RI. Menurutnya, revisi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus membuka ruang optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan jemaah Indonesia.

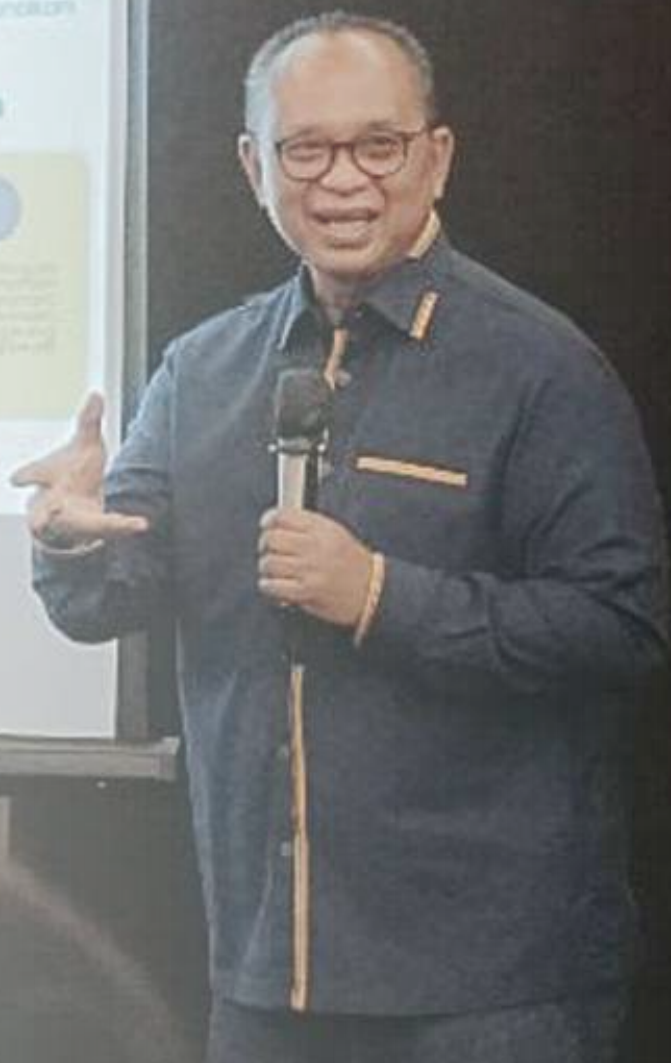
Sementara itu, pada BPKH Connect di Semarang, Anggota Badan Pelaksana BPKH Aceh Riana

Jaya prawira meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai pengelolaan dana haji. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana haji sama sekali bukanskema *ponzi*. Dana setoran setiap jemaah tetap menjadi hak pemiliknya dan dikelola secara profesional, transparan, serta sesuai prinsip syariah. Dana tersebut tidak pernah digunakan untuk memberangkatkan jemaah lain sebagaimana praktik "gali lubang tutup lubang" yang menjadi ciri skema *ponzi*.

Penjelasan tersebut diperkuat dalam

BPKH Connect di Mataram, Lombok, ketika Anggota Badan Pelaksana BPKH Arief Mufraini menyampaikan bahwa dana kelolaan BPKH yang kini mencapai sekitar Rp180 triliun ditempatkan pada instrumen investasi syariah dengan risiko terukur dan tingkat likuiditas yang tinggi. Nilai manfaat dari pengelolaan investasi tersebut kemudian dikembalikan kepada jemaah melalui subsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), penambahan saldo rekening virtual bagi jemaah tunggu, serta pemberian *living cost* bagi jemaah yang berangkat ke Tanah Suci.

Melalui rangkaian kegiatan di berbagai daerah tersebut, BPKH tidak hanya memperkuat literasi publik mengenai pengelolaan dana haji, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola yang semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dengan fondasi regulasi yang lebih kuat, investasi yang dikelola secara hati-hati, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, BPKH berupaya menjaga kepercayaan jemaah sekaligus memastikan manfaat dana haji dapat terus dirasakan, baik oleh jemaah yang akan berangkat maupun generasi jemaah di masa mendatang.





BPKH PERKUAT TRANSFORMASI DIGITAL EKOSISTEM HAJI DAN UMRAH MELALUI PARTISIPASI DI INTERNATIONAL ISLAMIC EXPO 2026

Transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah di era yang semakin terhubung. Melalui pemanfaatan teknologi, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi jutaan jemaah Indonesia.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui partisipasinya dalam International Islamic Expo (IIE) 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC),

Jakarta. Forum yang mempertemukan pelaku industri haji dan umrah dari berbagai negara ini menjadi ruang kolaborasi untuk menghadirkan inovasi sekaligus memperkuat ekosistem haji yang lebih modern.

Dalam kesempatan tersebut, BPKH melalui anak usahanya, BPKH Limited, menjalin kerja sama strategis dengan SAHL Group melalui peluncuran program Go SAHL. Inisiatif ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mempercepat digitalisasi layanan haji dan umrah sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor tersebut.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menilai International Islamic Expo menjadi wadah penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem haji yang semakin berkualitas.

"Kami melihat expo ini menjadi sarana bagi para pelaku industri, baik nasional maupun internasional, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah. Harapannya, kolaborasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi jemaah, tetapi juga mendukung peningkatan nilai manfaat yang



dihasilkan BPKH," ujarnya.

Menurut Fadlul, keikutsertaan BPKH Limited dalam ajang tersebut juga membuka peluang untuk menjajaki berbagai inovasi bisnis dan investasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan layanan haji dan umrah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem haji nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengelolaan dana haji yang dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Transformasi digital juga menjadi perhatian utama Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Penghimpunan, Transformasi, dan Teknologi Informasi, Harry Alexander. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya dilakukan pada sistem internal BPKH, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem layanan yang terhubung dari hulu hingga hilir.

Melalui program Go SAHL, BPKH Limited menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi dengan melibatkan 32 bank dan penyedia jasa pembayaran (PJP). Kolaborasi ini memungkinkan proses registrasi, pembayaran, hingga berbagai layanan pendukung dilakukan secara lebih mudah dan efisien. Ke depan, BPKH Limited juga menyiapkan pengembangan Digital Online Travel Agency (OTA) yang diharapkan dapat memperluas akses layanan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

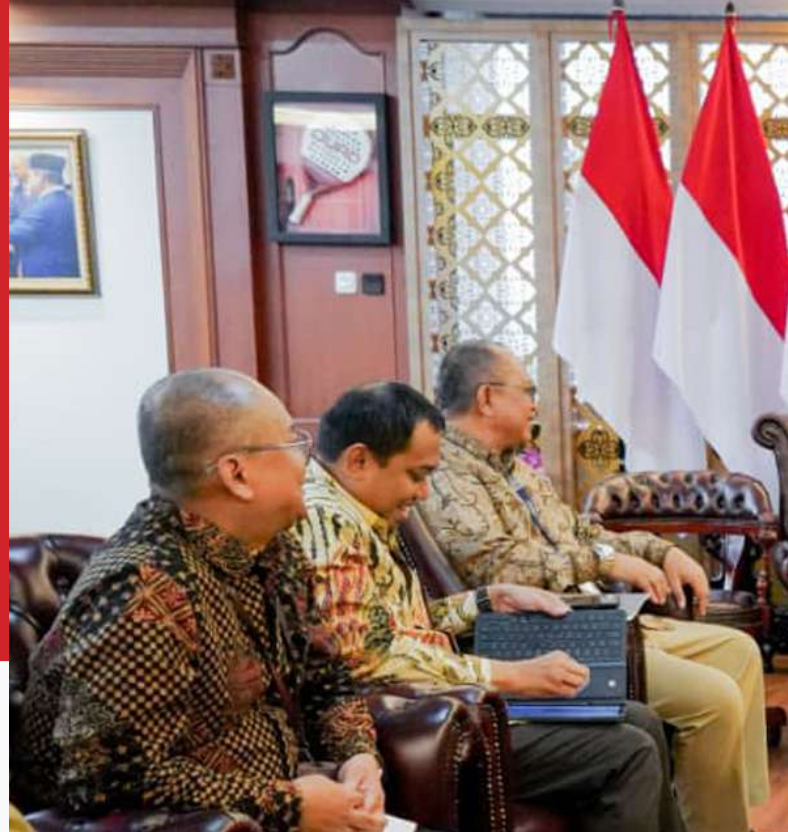
Partisipasi BPKH dalam International Islamic Expo 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya berorientasi pada aspek investasi, tetapi juga pada pengembangan inovasi yang mampu memberikan manfaat langsung bagi jemaah. Melalui sinergi dengan berbagai mitra strategis, BPKH terus mendorong lahirnya layanan yang lebih modern, transparan, dan mudah diakses.

Transformasi digital yang dibangun hari ini diharapkan menjadi fondasi bagi ekosistem haji dan umrah Indonesia

yang semakin terintegrasi, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus menghadirkan nilai manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh jemaah Indonesia.



DPR SAHKAN REVISI UU KEUANGAN HAJI, PERKUAT PERAN BPKH BAGI JEMAAH



Persetujuan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola dana haji yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan dana kelolaan mencapai sekitar Rp180 triliun, penguatan regulasi diharapkan mampu mengoptimalkan nilai manfaat, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

“Dana haji adalah amanah umat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi langkah penting untuk memperkuat kelembagaan BPKH sekaligus mengoptimalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh jemaah,” ujarnya dalam kegiatan BPKH Connect di Bandung.

Persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif DPR RI menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola dana haji Indonesia. Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), revisi regulasi ini merupakan momentum strategis untuk membangun fondasi pengelolaan dana haji yang semakin adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

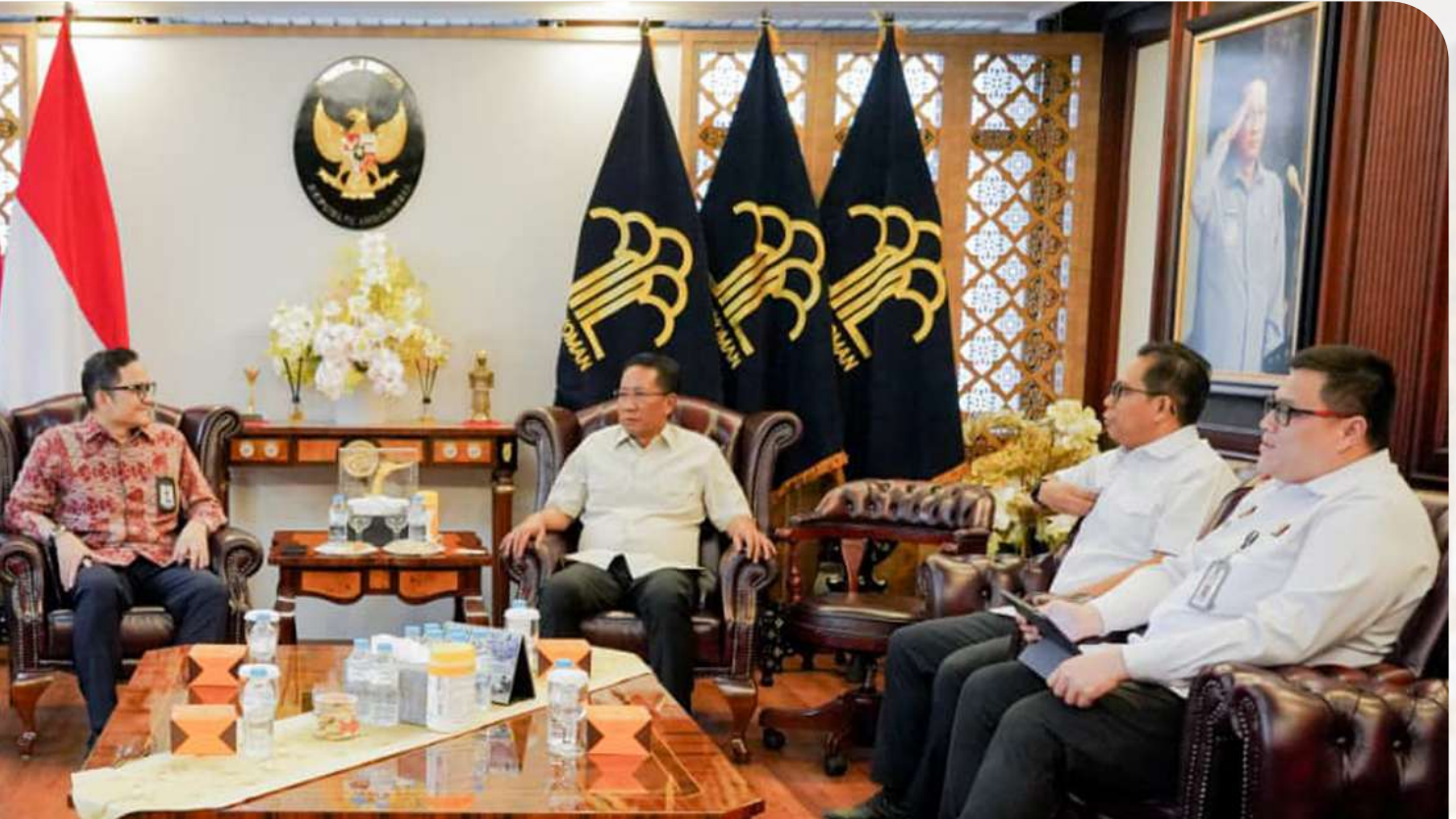
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa dinamika ekonomi global, perkembangan kebutuhan layanan jemaah, serta kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji menuntut adanya penguatan regulasi agar pengelolaan dana haji dapat terus memberikan manfaat optimal bagi umat.



Menurut Fadlul, perubahan regulasi tersebut akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam membangun pengelolaan dana haji secara produktif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana milik jemaah. Salah satu poin strategis yang diatur dalam revisi tersebut adalah perluasan ruang investasi yang

memungkinkan pengembangan dana pada sektor-sektor yang mendukung ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai



manfaat dana haji yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia. Selain itu, revisi undang-undang juga mencakup penguatan mitigasi risiko melalui pembentukan cadangan modal, peningkatan aspek pengawasan dan transparansi, serta peluang penerapan skema pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang lebih fleksibel bagi calon jemaah.

Berbagai perubahan tersebut mencerminkan upaya bersama untuk menghadirkan tata kelola dana haji yang semakin modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah dalam jangka panjang. BPKH meyakini bahwa penguatan regulasi akan menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji sekaligus meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh jemaah Indonesia.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Keuangan Haji, Abidin Fikri. Menurutnya, revisi regulasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola dana haji agar semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah.

Saat ini, dana haji yang dikelola BPKH telah mencapai sekitar Rp180 triliun. Dengan nilai dana yang terus berkembang, penguatan regulasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan, menjaga kepercayaan publik, serta mengoptimalkan nilai manfaat yang dapat kembali dirasakan oleh jemaah haji Indonesia. Melalui pembaruan regulasi ini, pengelolaan dana haji diharapkan semakin siap menghadapi tantangan masa depan dan mampu memberikan dukungan yang lebih besar bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji nasional.



DANA HAJI DIKELOLA OPTIMAL

MANFAATNYA KEMBALI UNTUK JEMAAH

Di balik setiap setoran biaya haji yang dibayarkan calon jemaah, terdapat proses pengelolaan dana yang dirancang untuk menghadirkan manfaat nyata bagi penyelenggaraan ibadah haji. Dana tersebut tidak hanya disimpan, tetapi dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga mampu menghasilkan nilai manfaat yang kembali dirasakan langsung oleh jemaah.

Pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan sebesar Rp87.409.365 per jemaah. Namun, jemaah hanya membayar rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.193.806, sementara selisih sebesar Rp33.215.559 dipenuhi dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji. Skema ini menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana hasil investasi dana haji dimanfaatkan untuk menjaga biaya haji tetap lebih terjangkau.



Selain membantu menekan biaya perjalanan, jemaah juga menerima *living cost* sebesar 750 Riyal Arab Saudi, atau sekitar Rp3,4 juta, sebagai bekal operasional selama berada di Tanah Suci. Bagi jemaah yang masih menunggu antrean keberangkatan, manfaat pengelolaan dana juga diberikan melalui *Virtual Account (VA)* dalam bentuk penambahan nilai manfaat yang dapat digunakan untuk membantu pelunasan biaya haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan dana haji dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap syariah.

"Dana haji yang dikelola BPKH tidak hanya dijaga keamanannya, tetapi juga dioptimalkan secara syariah agar memberikan nilai manfaat bagi jemaah. Nilai manfaat inilah yang membantu menjaga biaya haji tetap lebih rasional dan meringankan beban jemaah," ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi, BPKH juga menghadirkan BPKH Apps yang memungkinkan jemaah memantau nilai manfaat pada *Virtual Account* secara mandiri. Melalui akses informasi yang mudah dan terbuka, jemaah dapat mengetahui perkembangan dana mereka sekaligus





memahami bagaimana hasil pengelolaan tersebut memberikan manfaat bagi penyelenggaraan ibadah haji.

Melalui tata kelola yang amanah dan berkelanjutan, BPKH terus memastikan bahwa dana haji tidak hanya terlindungi, tetapi juga dikelola secara produktif sehingga mampu menghadirkan manfaat yang semakin besar bagi jemaah haji Indonesia, baik yang akan berangkat maupun yang masih berada dalam masa tunggu.







Bank
Amalat
Pengelolaan
Indonesia (2017)



PANGGILAN DARI ARAFAH

Suasana Padang Arafah yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M terasa begitu dekat bagi ratusan santri Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, Kota Bekasi. Melalui program "Panggilan dari Arafah 2026" yang diinisiasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), para santri diajak menyaksikan secara langsung khutbah wukuf dari Tanah Suci sekaligus memahami makna ibadah haji sebagai cita-cita spiritual yang perlu dipersiapkan sejak usia muda.

Menghadirkan siaran langsung dari Arafah, simulasi ibadah haji, serta sesi edukasi bersama para narasumber, kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang menghubungkan para santri dengan suasana puncak ibadah haji. Meski hujan sempat mengguyur lokasi acara, antusiasme para santri tidak surut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga berbuka puasa bersama.

Berbicara langsung dari Padang Arafah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menggambarkan kondisi jemaah Indonesia yang tetap khusyuk beribadah meskipun menghadapi





diwujudkan dengan langkah nyata, yaitu mendaftar sejak dini. Menurutnya, semakin awal seseorang mendaftar, semakin jelas pula estimasi waktu keberangkatannya. Ia mengajak generasi muda untuk mempersiapkan diri tidak hanya secara finansial, tetapi juga melalui ilmu, kesehatan, dan kesiapan spiritual sembari menanti panggilan Allah SWT.

Pesan tersebut sejalan dengan pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, KH Abu Bakar Rahziz, yang menyebut Hari Arafah sebagai momentum terbaik untuk menumbuhkan kecintaan terhadap ibadah haji. Ia berharap pengalaman menyaksikan wukuf secara langsung mampu

memahami bahwa haji bukan sekadar perjalanan ibadah, melainkan proses panjang yang membutuhkan kesiapan ilmu, akhlak, perencanaan, dan kemampuan finansial.

Melalui "Panggilan dari Arafah 2026", BPKH menghadirkan syiar haji dengan pendekatan yang lebih dekat kepada generasi muda. Program ini menjadi ikhtiar untuk menanamkan cita-cita berhaji sejak dini, sekaligus memperkuat literasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji. Harapannya, semakin banyak generasi muda yang tumbuh dengan kesadaran bahwa panggilan ke Baitullah bukan hanya impian, tetapi sebuah perjalanan yang dapat dipersiapkan mulai hari ini.

suhu

yang mencapai sekitar 40 derajat Celsius. Ia menjelaskan bahwa seluruh layanan kesehatan, konsumsi, dan mobilitas jemaah terus dipastikan berjalan dengan baik agar para jemaah dapat fokus menjalankan wukuf.

Dalam dialog tersebut, Fadlul juga menyampaikan pesan sederhana namun bermakna kepada para santri: niat berhaji perlu

membuka wawasan para santri sekaligus menumbuhkan semangat menabung dan mempersiapkan diri menuju Baitullah sejak usia muda.

Semangat literasi haji juga diperkuat melalui talkshow bersama Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, dan Nyai Hj. Badiriyah Fayumi. Keduanya mengajak para s a n t r i





MENJAGA STANDAR BMI SEBAGAI BANK PERTAMA MURNI SYARIAH YANG MODERN

Oleh: Prof. Dr. H.M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.*) & Dr. Aziz Fajar Ariwibowo, ST., MAB.**)

Dunia terus bergerak dari era VUCA (*volatile, uncertain, complex, dan ambigu*) di masa sebelum pandemi COVID-19 yang mengajak kita untuk lebih *agile* dan adaptif, lalu BANI (*brittle, anxious, nonlinear, dan incomprehensible*) saat pandemi COVID-19 yang mendorong kita untuk lebih resilient dalam sistem yang rapuh, dan NAVI (*nonlinear, accelerated, volatile, dan interconnected*) di masa booming kecerdasan buatan yang mendorong kita untuk bergerak lebih cepat dalam konektivitas global. Kondisi yang sama juga terjadi pada industri perbankan di Indonesia, terus bergerak dengan kecenderungan perilaku masyarakat yang juga terus berubah seiring perkembangan teknologi yang makin canggih. Pola pikir masyarakat saat ini lebih cerdas dibandingkan beberapa dekade sebelumnya serta terintegrasi dengan hampir seluruh aspek kehidupannya. Perkembangan teknologi serta perubahan perilaku tersebut mau tidak mau harus diikuti oleh industri perbankan agar mampu bertahan hidup dan tidak ditinggalkan oleh masyarakat.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), sebagaimana bank umum dan bank syariah lainnya, dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, pergeseran era, dan perkembangan teknologi. Sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia, *organizational values* BMI adalah Islami, Modern, dan Profesional. Islami diterjemahkan sebagai integritas, modern diturunkan menjadi tanggap dan terbuka, serta profesional digambarkan sebagai kompeten dan prima. BMI diharapkan menjadi bank yang senantiasa tanggap terhadap perubahan lingkungan dan tantangan

sesuai perkembangan jaman, lalu bersikap terbuka atas kritik dan masukan, serta secara berkelanjutan mampu memberikan solusi yang inovatif terhadap kebutuhan produk dan layanan perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tulisan ini berupaya memberikan gambaran strategi yang perlu dilakukan oleh BMI untuk menjaga standarnya sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia yang modern.

Berbagai proyeksi mengenai tren global di masa depan setiap tahun muncul di media dengan beberapa pembaharuan, berikut adalah enam tren yang sudah dibahas sejak sepuluh tahun yang lalu namun masih relevan hingga saat ini. Tren global pertama adalah kecenderungan masyarakat menjadi *brand advocate*, yaitu tindakan sukarela dan proaktif dalam mempromosikan dan merekomendasikan sebuah merek kepada orang lain melalui word of mouth, media sosial, ataupun bentuk advokasi lainnya, yang bersumber dari loyalitas, kepuasan, komitmen, dan keterikatan terhadap merek tersebut (Shimul et al., 2026). Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa pada saat melakukan advokasi atas merk tertentu, masyarakat dapat menunjukkan eksistensi dirinya, mendapatkan validasi status dan pengakuan komunitas, serta mendapatkan makna dan nilai-nilai bersama. Salah satu riset menunjukkan 92% masyarakat cenderung untuk lebih mempercayai rekomendasi dari keluarga dan teman dibandingkan dari iklan. Secara global konten-konten review produk atau merk oleh pengguna mempengaruhi 84% keputusan membeli, dipercaya oleh 88%, serta lebih disukai oleh 63% calon pengguna produk lainnya, bahkan menjadi sumber kepercayaan dan

pertumbuhan melebihi dampak dari iklan, dari komunikasi korporasi, maupun dari *influencer* sosial media. Pergeseran peran ini diproyeksikan akan semakin meningkat sehingga di masa depan hampir tidak ada lagi bisnis yang sepenuhnya mampu melakukan kontrol atas produk, merk, dan pesan-pesan mereka.

Tren global kedua adalah teknologi *digital mobile* yang semakin menjadi *mainstream*, berdampak paling besar, serta mampu merubah dan membentuk lanskap bisnis baru. Pada industri perbankan, hasil riset di beberapa negara menunjukkan 67% responden menyatakan preferensi untuk melakukan interaksi dengan bank tidak hanya melalui kantor cabang dan ATM namun juga melalui *mobile banking*, dan *internet banking*. Bahkan *mobile banking* saat ini sudah bergeser dari sekedar pendukung transaksi menjadi titik interaksi utama bank dengan nasabah, menjadi identitas digital, alat pembayaran, sumber data, serta sebagai platform untuk otomasi layanan. Pada era *digital mobile* ini, seluruh layanan dan produk perbankan dituntut untuk lebih cepat, lebih cerdas, lebih personal, lebih lengkap, bahkan lebih terintegrasi dengan layanan lintas ekosistem berdasarkan algoritma aktivitas pengguna. Pada era tren teknologi *digital mobile* ini, keunggulan sebuah bank bukan lagi berbentuk produk atau layanan dengan segala macam fitur turunannya tetapi berupa ekosistem terintegrasi yang didukung dengan data dan *artificial intelligence*.

Tren global ketiga adalah *social partnership* antara pemerintah dengan masyarakat dan korporasi. Dalam kebijakan publik, hal tersebut mirip dengan konsep *collaborative governance* yaitu tata kelola yang secara formal melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik publik maupun privat dalam mengelola dan mengimplementasikan program-program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum (Ansell & Gash, 2008), sedangkan dalam teori organisasi mirip dengan konsep *boundary spanning organization* yaitu organisasi yang secara aktif berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan lainnya agar dapat saling terhubung dan saling bertukar pengetahuan, proses, dan informasi (Burbach et al., 2023). Dalam sebuah *social partnership* diharapkan pemerintah, korporasi, dan masyarakat bersama-sama menyumbang sumber daya, menanggung risiko, dan berbagi manfaat secara proporsional. Salah satu riset di Uni Eropa menggambarkan harapan masyarakat agar korporasi lebih progresif mengambil inisiatif dalam mendukung transformasi sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam skala yang lebih masif serta menyatakan 73% generasi milenium tidak percaya bahwa pemerintah mampu secara mandiri dalam menyelesaikan isu-isu sosial masyarakat dan 83% berharap merek-merek dominan ikut terlibat dan turun tangan membantu pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu tersebut.

Tren global keempat adalah memberikan apresiasi kepada masyarakat berdasarkan pencapaian pribadi yang diukur dan divalidasi secara digital melalui *wearable devices* diantaranya adalah monitoring terhadap kesehatan, kebugaran, serta keahlian dan pengetahuan baru. Model apresiasi ini menunjukkan pergeseran dari sebelumnya yang bersifat generik dan pasif menjadi apresiasi yang lebih adil, lebih personal berdasarkan perilaku, serta lebih kontekstual. Pemberian apresiasi tidak hanya berdasarkan hasil akhir namun juga menghargai proses, usaha, disiplin, dan perkembangan individual. Model apresiasi berdasarkan perilaku ini tidak hanya meningkatkan loyalitas dan perilaku yang konsisten (Chang et al., 2026), namun juga menjadi jembatan untuk integrasi lintas ekosistem sebagai pondasi terwujudnya *smart cities* dan *smart farming* yang berkelanjutan.

Tren global kelima adalah korporasi yang secara terbuka menyatakan sikapnya atas isu-isu sosial kemasyarakatan seperti *bullying*, kemacetan lalu lintas, kesetaraan gender, lingkungan hidup dan perubahan iklim, inklusi, pemberantasan korupsi, kesehatan, fraud dan kebohongan publik. Riset Edelman Trust Barometer tahun 2026 di 28 negara menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada korporasi (27 dari 28 negara percaya korporasi mampu mengambil langkah nyata yang berdampak pada masyarakat) lebih tinggi dibandingkan kepada pemerintah dan media (14 dari 28 negara dan 13 dari 28 negara tidak percaya pemerintah dan media dapat melakukan tindakan yang berdampak). *Corporate social activism* membentuk brand menjadi otentik, tangguh, dan konsisten, berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka menengah bahkan berdampak juga pada penguatan brand equity jika perusahaan mampu konsisten menjalankannya dalam jangka panjang.

Tren global keenam adalah *connected living* yaitu ekosistem kehidupan yang terkoneksi berbasis *Internet of Things* ataupun *Artificial Intelligence of Things*. Diproyeksikan nantinya pada tahun 2035 sebanyak lebih dari 50 miliar perangkat di dunia ini akan terhubung dengan manusia, infrastruktur, dan lingkungan fisiknya melalui sambungan *wi-fi*, *bluetooth*, dan selular. Pada prinsipnya, dengan dukungan *IoT* dan *AIoT* maka *smartphone* kita dituntut tidak sekedar menjadi *devices* yang terhubung dengan internet saja, namun lebih dari itu menjadi orkestrator ekosistem, serta menjadi *real time connected homes, factories, cities*, dan sistem *health care*. Masa depan *connected living* adalah peningkatan daya saing dan kualitas hidup kita yang membaik sebagai hasil orkestrasi lintas area sejak dari rumah, kota, hingga regional.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa kata kunci

yang menjadi benang merah dan dasar bagi BMI untuk mengimplementasikan strategi menjaga standar bank pertama murni syariah modern di masa depan adalah *digital mobile*, ekosistem, dan orkestrasi. Strategi pertama, memperbanyak video review atas produk dan layanan unggulan yang dilakukan oleh tim *product development*, karyawan, nasabah-nasabah perorangan, ataupun komunitas-komunitas keagamaan (komunitas hijrah, halal, syariah, pendidikan, haji, atau wakaf). Sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia, BMI memiliki basis nasabah loyal yang secara sukarela mengidentifikasi dirinya dengan BMI, memiliki ikatan emosional spiritual yang kuat, serta memiliki kepercayaan yang tinggi kepada BMI. BMI mendapatkan skor tertinggi dalam overall SLE (*Satisfaction Loyalty Engagement*) Index tahun 2023 yaitu 65,3 di atas skor BSI 60,7 dan skor BCA Syariah 56,7 bahkan mendapatkan peringkat pertama untuk aspek loyalty, engagement, dan market engagement, serta peringkat ketiga untuk satisfaction. Pondasi tersebut menjadi bekal bagi kekuatan BMI di masa depan yang ditunjukkan oleh seberapa rela nasabah berbicara atas nama BMI. Beberapa contoh rencana aksi yang dapat dilaksanakan BMI dalam jangka waktu pendek menengah adalah kisah hijrah finansial nasabah, review produk dan layanan unggulan oleh komunitas, serta mewajibkan karyawan menjadi reviewer produk dan layanan unggulan berdasarkan narasi branding dan literasi digital dari unit product management. Edelman Trust Barometer tahun 2026 menggambarkan review oleh karyawan menjadi salah satu sumber terpercaya dalam membentuk opini publik terhadap merek.

Strategi kedua, meningkatkan kapabilitas *mobile banking* yaitu MDIN (Muamalat Digital Islamic Network) sebagai *lifestyle platform* hijrah yang

mengorkestrasi dan mengintegrasikan seluruh produk dan layanan perbankan, sistem pembayaran, aktivitas sosial, dan ibadah di dalam ekosistem unggulan BMI. Sebagai contoh MDIN sebagai platform bagi ekosistem haji dan umrah antara lain booking tiket pesawat Indonesia – Arab Saudi dan kereta cepat Saudi Arabia Railways, booking kamar hotel dan restoran di Arab Saudi, layanan pengiriman kargo haji dari Arab Saudi ke Indonesia, pembayaran denda daging DAM, booking vaksin, memilih klinik/RS, database kesehatan jamaah, layanan keimigrasian, serta layanan setoran awal, setoran lunas, cicilan emas, pembiayaan talangan pelunasan biaya haji, dan akses pembiayaan produktif untuk pengusahapengusaha di dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Strategi ketiga, menegaskan posisi BMI bahwa setiap produk dan layanan perbankan, seluruh aktivitas korporasi, serta seluruh keputusan bisnis yang diambil oleh BMI adalah untuk memenuhi lima maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa/nyawa/kesehatan, menjaga akal/kecerdasan, menjaga keturunan/kehormatan, dan menjaga harta. Pada konteks kekinian, maka isu-isu sosial yang sedang berkembang di Indonesia dapat

dikelompokkan ke dalam lima maqashid syariah tersebut: pemberantasan kriminalitas, anti radikalisme, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah perlindungan atas agama; kemudahan akses layanan kesehatan, keselamatan lalu lintas, dan keberlanjutan lingkungan adalah perlindungan atas jiwa/nyawa/kesehatan; kemudahan akses pendidikan dan informasi adalah perlindungan atas akal/kecerdasan; anti-bullying, tawuran, kenakalan remaja, diskriminasi sosial, dan kekerasan pada kelompok rentan, serta kesetaraan gender adalah perlindungan atas keturunan/kehormatan; sedangkan pemberantasan kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja, anti korupsi, anti kebohongan publik, serta penegakan integritas adalah perlindungan atas harta. Sebagai contoh BMI dapat membuat gerakan sosial bersama komunitas dan ormas Islam bertema Muamalat Islamic Financial Social Impact dan secara berkala meluncurkan program turunannya seperti hijrah dari kriminalitas dan radikalisme, sehat jiwa sehat iman, hijrah selamat berkendara, wakaf bersama sahabat, hijrah dari kekerasan dan perundungan, muslimah berdaya, hijrah dari gratifikasi dan korupsi, serta hijrah menuju kejujuran publik.

Strategi keempath, membuat program apresiasi kepada nasabah misalnya melalui program Muamalat Vitality Life Partner yang dirancang bukan hanya sekedar program loyalitas namun menjadi manifestasi dari maqashid syariah di era digital yaitu bank tidak hanya menjaga dan mengelola harta namun juga mendukung perlindungan atas jiwa/nyawa/kesehatan dan peningkatan kualitas kehidupan nasabah melalui ikhtiar yang istiqamah dalam rangka mencapai masalahat. Dikenal sebagai behavior-based model, dimensi yang diukur dalam program apresiasi tidak hanya pencapaian finansial (konsistensi menabung, target nilai investasi, atau pembayaran angsuran tepat waktu) dan kesehatan (jumlah langkah kaki, tidur berkualitas, olah raga rutin, tekanan darah/kolesterol/asam urat/gula darah) namun juga diintegrasikan dengan aktivitas spiritual (konsistensi membaca basmalah, konsistensi shalat tepat waktu, membaca wirid, membaca Al Qur'an, puasa sunnah, atau sedekah) sehingga terbentuk ekosistem apresiasi yang terintegrasi dan berbasis nilai-nilai Islami. Misalkan nasabah berjalan kaki 1000 langkah setiap hari selama 1 minggu mendapatkan poin dan cashback untuk belanja suplemen kesehatan, kemudian komitmen menabung Rp20 ribu setiap hari dalam sebulan mendapatkan tambahan nisbah bagi hasil, pencapaian tidur berkualitas sebanyak 8 jam setiap hari selama 1 minggu mendapatkan akses gratis di gym terdekat, wirid membaca al qur'an one day one juz setiap hari dalam sebulan mendapatkan badge spiritual yang bisa dipublikasikan di media sosial serta gratis 3 bulan iuran BPJS Kesehatan.

BMI bukan satu-satunya bank umum syariah besar di

Indonesia, di atasnya masih ada bank lain yang memiliki modal dan skala jauh lebih besar. Namun demikian, BMI memiliki keunggulan kompetitif yang hanya dimiliki oleh BMI bahkan tidak dapat disaingi oleh bank umum syariah lainnya yaitu bank pertama murni syariah, komitmen sosial sejak proses pendirian yang melibatkan jamaah haji dan Majelis Ulama Islam (MUI), serta diferensiasi produk wakaf produktif. Berbekal keunggulan tersebut, BMI diyakini dapat menjaga standar sebagai bank umum syariah yang modern.

MENYAPA CALON JEMAAH DENGAN LITERASI KEUANGAN HAJI DAN SINERGI ANAK USAHA

Oleh: Dwi Lukitosari

Literasi Keuangan Calon Jemaah Haji

Mengutip dari laman OJK, Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Dalam aktivitas literasi dilakukan edukasi kepada masyarakat setidaknya mencakup antara lain: deskripsi, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, dan pengelolaan keuangan.



Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan nasional pada tahun 2025 naik menjadi

66,46% dari sebelumnya 65,43% di tahun 2024. Namun demikian, indeks literasi untuk layanan syariah masih cukup rendah yakni 43,42% di tahun 2025 meskipun secara persentase sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 39,11%.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku lembaga yang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi syariah secara aktif turut berperan dalam peningkatan literasi keuangan, khususnya keuangan haji. BPKH melalui Sosialisasi Keuangan Haji meliterasi masyarakat secara luas, calon jemaah haji secara khusus, praktisi maupun akademisi di berbagai wilayah di tanah air. Sejak tahun 2023, BPKH telah melakukan Sosialisasi Keuangan Haji di wilayah antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Acara sosialisasi ini dihadiri setidaknya 250 peserta dari berbagai kalangan.

Melalui Sosialisasi Keuangan Haji, BPKH mengedukasi terkait keterbukaan akses informasi pengelolaan haji dengan mempromosikan kanal media sosial BPKH, mempromosikan pemanfaatan dan akses BPKH Apps untuk calon jemaah haji tunggu sekaligus mensosialisasikan peran BPKH dalam memberikan nilai manfaat kepada calon jemaah haji, menginformasikan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dengan diperolehnya WTP selama tujuh tahun berturut-turut, serta menginformasikan apa dan bagaimana uang setoran calon jemaah haji dikelola dan diinvestasikan.





Dalam pelaksanaannya, BPKH tidak hanya mendatangkan pimpinan BPKH untuk melaksanakan sosialisasi tetapi BPKH juga menggandeng beberapa mitra antara lain: Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai wakil masyarakat yang mengawasi BPKH di pemerintahan, praktisi di bidang keuangan syariah, akademisi, serta tokoh masyarakat lokal. Kehadiran beberapa mitra diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan memperluas wawasan peserta sosialisasi dari berbagai sudut pandang terkait pengelolaan keuangan haji. Harapannya, para peserta tidak hanya memperoleh literasi untuk diri sendiri melainkan dapat menjadi jangkar untuk memperluas literasi keuangan haji ke lingkungan maupun ekosistem terdekatnya. Hal ini juga berpotensi meningkatkan brand awareness BPKH secara luas meskipun dengan cara yang cukup konvensional yakni *word of mouth*.

mempromosikan beberapa produk yang bisa dimanfaatkan para peserta sosialisasi untuk dapat menabung maupun mendaftar haji serta mempersiapkan dana pelunasan haji sebagai contoh yakni produk Solusi Emas Hijrah (SOLEH) dan Tabungan iB Hijrah Haji. Booth BMI juga selalu tersedia diberbagai kesempatan Sosialisasi Keuangan Haji untuk mempermudah para peserta sosialisasi yang ingin langsung membuka tabungan haji atau bahkan memperoleh antrian haji di lokasi pelaksanaan sosialisasi.

Kolaborasi dengan BMI dalam pelaksanaan Sosialisasi Keuangan Haji diharapkan dapat mempermudah peserta maupun calon jemaah haji untuk memperoleh akses produk keuangan yang sesuai dengan rencana perjalanan haji mereka. Bagi BMI, keikutsertaan dalam sosialisasi dapat menambah portofolio dana maupun penyaluran pembiayaan secara efisien tanpa harus mendatangi calon pelanggan satu per satu. Tentunya bagi BPKH juga diharapkan kolaborasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan pendaftaran haji yang berdampak pada peningkatan dana kelolaan BPKH.



Sinergi dengan Anak Usaha

Selain menggandeng beberapa mitra, dalam pelaksanaan Sosialisasi Keuangan Haji BPKH juga tak lupa menggandeng Bank Muamalat Indonesia (BMI) selaku anak usaha BPKH. BMI

BPKH PERLUAS JEJARING GLOBAL

JAJAKI KOLABORASI STRATEGIS DENGAN INSEAD

Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, pengelolaan dana haji dituntut semakin adaptif, profesional, dan mampu mengikuti praktik tata kelola terbaik dunia. Menyadari tantangan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperluas jejaring internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan

sumber daya manusia dalam mengelola dana haji Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja BPKH ke INSEAD Business School di Singapura. Delegasi BPKH dipimpin oleh Anggota Dewan Pengawas Dr. KH. M. Dawud Arif Khan, didampingi Anggota Dewan Pengawas Heru Muara Sidik, Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Harry Alexander, serta Deputy Bidang Investasi Dr. Juni Suprianto. Kunjungan ini menjadi langkah awal peninjauan kolaborasi strategis di bidang riset, pengembangan kapasitas, dan peningkatan kompetensi pengelola dana haji.

INSEAD merupakan salah satu institusi pendidikan bisnis terkemuka di dunia yang dikenal memiliki reputasi kuat dalam bidang kepemimpinan, manajemen, investasi, dan tata kelola organisasi. Dengan jaringan akademik dan profesional yang luas, INSEAD menjadi mitra yang dinilai tepat untuk mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan BPKH dalam menghadapi tantangan pengelolaan dana haji yang semakin kompleks.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kampus INSEAD Singapura, delegasi BPKH diterima oleh Ambar Widiastuti, Assistant Director Client Relations Executive Education. Diskusi berlangsung hangat dengan fokus pada peluang kerja sama yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan dana haji di Indonesia.

"Suasana pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif, dengan diskusi yang terarah pada upaya



memperkuat kapasitas pengelolaan dana haji melalui pemanfaatan keahlian dan ekosistem pembelajaran yang dimiliki INSEAD," ujar Dr. KH. M. Dawud Arif Khan.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah peluang kolaborasi dalam bidang riset dan capacity building. BPKH dan INSEAD menjajaki kemungkinan penyelenggaraan berbagai program pendidikan eksekutif, pelatihan kepemimpinan, serta pengembangan kompetensi bagi para pengelola dana haji. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan sumber daya manusia BPKH dalam merespons perubahan ekonomi global, perkembangan instrumen investasi, serta praktik tata kelola yang terus berkembang.

Bagi BPKH, penguatan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas pengelolaan dana haji. Di samping mengedepankan prinsip syariah, transparansi, dan kehati-hatian, pengelolaan dana haji juga membutuhkan kemampuan membaca dinamika pasar, mengelola risiko investasi, serta mengambil keputusan berdasarkan kajian yang komprehensif.

Selain pengembangan kompetensi, kedua lembaga juga membahas peluang kerja sama penelitian yang dapat mendukung penyusunan kebijakan berbasis data dan praktik terbaik internasional. Pendekatan berbasis riset dinilai semakin penting agar strategi pengelolaan dana haji mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi jemaah.

Melalui kolaborasi yang erat dan berkelanjutan, BPKH berharap dapat mewujudkan pengelolaan dana haji yang semakin transparan, aman, optimal, dan memberi nilai tambah yang lebih besar bagi jemaah serta umat secara keseluruhan

Menurut Dawud Arif Khan, kolaborasi dengan institusi pendidikan bisnis bertaraf internasional merupakan bagian dari visi jangka panjang BPKH untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan.

"Melalui kolaborasi yang erat dan berkelanjutan, BPKH berharap dapat mewujudkan pengelolaan dana haji yang semakin transparan, aman, optimal, dan memberi nilai tambah yang lebih besar bagi jemaah serta umat secara keseluruhan," ujarnya.

Kunjungan ke INSEAD tidak sekadar menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga menandai komitmen BPKH untuk terus belajar dari praktik terbaik dunia. Melalui penguatan jejaring internasional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengembangan budaya riset, BPKH berharap mampu menghadirkan tata kelola dana haji yang semakin modern, adaptif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu memastikan dana haji dikelola secara profesional sehingga memberikan nilai manfaat yang semakin besar bagi jemaah haji Indonesia.



MENJAGA DANA HAJI

MELALUI EFISIENSI BPIH DAN KOLABORASI EKOSISTEM

Di tengah kebahagiaan Idul Adha, ada satu pekerjaan besar yang perlu terus dijaga bersama: memastikan dana haji tetap berkelanjutan, biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap rasional, dan hak jemaah tunggu tetap terlindungi secara adil. Keberlanjutan dalam konteks ini bukan hanya soal tersedianya dana hari ini, melainkan juga tentang kemampuan sistem haji nasional menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keterjangkauan biaya, dan keadilan antar generasi.

Kita semua memahami adanya aspirasi yang wajar dari masyarakat. Di satu sisi, jemaah berharap biaya haji tidak semakin membebani. Di sisi lain, kualitas layanan harus tetap baik: penerbangan aman dan tepat waktu, akomodasi layak, transportasi tertib, konsumsi memadai, layanan kesehatan andal, serta pendampingan yang manusiawi bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi. Dua harapan ini sama-sama sah, tetapi keduanya tidak mudah dipenuhi tanpa inovasi tata kelola yang lebih kuat.

Dalam jangka panjang, pelayanan dan penyelenggaraan haji hampir pasti menghadapi tekanan biaya yang meningkat. Faktor inflasi, pergerakan nilai tukar, kenaikan standar keselamatan, keterbatasan kapasitas di tanah suci, peningkatan kualitas layanan, serta dinamika harga global akan terus memengaruhi biaya riil.

Namun, tantangan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan menaikkan atau menurunkan angka. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana seluruh ekosistem haji mampu bekerja lebih efisien, transparan, terukur, dan saling terhubung.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian beban biaya jemaah berangkat ditopang oleh nilai manfaat pengelolaan dana haji. Skema ini membantu menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah yang berangkat pada tahun berjalan.

Namun, karena nilai manfaat tersebut berasal dari dana kolektif seluruh jemaah, termasuk jemaah tunggu, maka keseimbangannya perlu terus dijaga. Apabila porsi penggunaan nilai manfaat terlalu besar dan berlangsung terlalu lama, ruang bagi akumulasi manfaat jemaah tunggu akan semakin terbatas. Di sinilah isu keadilan antar generasi menjadi penting untuk diletakkan secara proporsional.

Keadilan antar generasi tidak berarti mengurangi keberpihakan kepada jemaah yang berangkat hari ini. Justru sebaliknya, keadilan itu menuntut agar jemaah hari ini memperoleh layanan yang layak, sementara jemaah masa depan tidak mewarisi beban biaya yang terlalu berat. Dengan demikian, diskusi tentang subsidi, nilai manfaat, dan BPIH perlu ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan jangka panjang, bukan dalam pertentangan antara generasi jemaah.

Tekanan lain yang juga perlu diperhitungkan adalah risiko nilai tukar. Sebagian besar komponen biaya haji dibayarkan dalam mata



uang asing, terutama untuk layanan yang berlangsung di luar negeri. Sementara itu, sebagian besar penghimpunan dan pengelolaan dana berasal dari rupiah. Ketika rupiah melemah atau harga layanan di luar negeri meningkat, BPIH akan ikut tertekan.

Kondisi ini tidak dapat diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal. Diperlukan kombinasi antara manajemen risiko, strategi investasi yang hati-hati namun adaptif, efisiensi operasional, dan penguatan daya tawar melalui perencanaan yang lebih terintegrasi.

Refleksi Arah Pengelolaan Dana Haji

Pengelolaan dana haji memang harus berpegang pada prinsip kehati-hatian. Dana ini adalah amanah umat, sehingga keselamatan pokok dana, kepatuhan syariah, dan kepatuhan hukum harus menjadi fondasi utama. Namun, kehati-hatian tidak selalu berarti pasif. Dalam batas tata kelola yang baik, pengelolaan dana dapat tetap progresif, profesional, dan mampu menangkap peluang yang aman serta memberi nilai tambah bagi jemaah.

Untuk itu, kepastian ruang diskresi bisnis yang sehat menjadi penting. Para pengelola dana publik memerlukan batas yang jelas antara keputusan bisnis yang wajar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan penyalahgunaan kewenangan. Kejelasan ini

umrah secara strategis. Indonesia memiliki skala jemaah yang sangat besar. Skala ini seharusnya menjadi daya tawar untuk memperoleh harga layanan yang lebih efisien tanpa menurunkan kualitas.

Integrasi Teknologi Lintas Instansi

Salah satu ruang efisiensi terbesar berada pada integrasi teknologi lintas pemangku kepentingan. Data jemaah, jadwal keberangkatan, kebutuhan layanan, kapasitas akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan pengawasan lapangan perlu dikelola dalam satu arsitektur digital yang saling terhubung. Integrasi ini tidak harus menghapus kewenangan masing-masing pihak, tetapi harus memungkinkan data mengalir secara aman, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan.

Melalui dashboard bersama, penyelenggara haji, pengelola keuangan haji, regulator, mitra layanan, petugas lapangan, dan ekosistem pendukung dapat melihat kebutuhan secara lebih presisi. Data yang baik akan membantu menyusun proyeksi kapasitas, merencanakan distribusi jemaah, menghindari duplikasi proses, menekan biaya koordinasi, serta mempercepat deteksi masalah di lapangan. Bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi, teknologi juga dapat membantu monitoring layanan, pergerakan, kesehatan, dan respons kedaruratan secara lebih cepat.



Integrasi teknologi juga dapat me-leverage ekosistem umrah. Setiap tahun, jutaan perjalanan umrah menciptakan data, jaringan layanan, permintaan hotel, transportasi, katering, pembiayaan, asuransi, perlengkapan ibadah, dan sistem pembayaran.

Jika ekosistem ini dikelola secara lebih terhubung dengan kebutuhan haji, Indonesia dapat memiliki basis data permintaan

bukan untuk mengurangi prinsip kehati-hatian, melainkan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara profesional, terdokumentasi, dan tidak semata-mata terdorong oleh rasa takut terhadap risiko hukum.

Di sisi lain, efisiensi BPIH tidak cukup hanya bertumpu pada hasil investasi. Penurunan biaya haji yang berkelanjutan memerlukan pendekatan lebih luas, yaitu integrasi tata kelola layanan, penguatan data, digitalisasi proses, konsolidasi permintaan, dan pemanfaatan ekosistem haji-

yang lebih besar dan berkesinambungan sepanjang tahun. Dengan skala yang lebih besar, negosiasi layanan dapat dilakukan lebih kuat, lebih dini, dan lebih berbasis data.

Dalam kerangka tersebut, haji dan umrah tidak perlu dilihat sebagai dua ruang layanan yang terpisah sepenuhnya. Keduanya dapat menjadi satu ekosistem besar yang saling memperkuat. Layanan umrah dapat menjadi laboratorium peningkatan kualitas, pengujian sistem digital, pengembangan vendor berkinerja baik, dan



penguatan rantai pasok. Sementara itu, kebutuhan haji dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran, data, dan kapasitas yang sudah terbangun sepanjang tahun melalui ekosistem umrah.

Transparansi Vendor sebagai Ruang Penurunan BPIH

Potensi penurunan BPIH masih terbuka luas, terutama apabila proses penetapan penyedia layanan

rupiah biaya jemaah menghasilkan kualitas layanan yang sepadan.

Proses pemilihan penyedia layanan dapat diperkuat dengan benchmark harga, standar pelayanan minimum, rekam jejak kinerja, mekanisme evaluasi terbuka, audit trail digital, serta kontrak berbasis capaian layanan.



Pada layanan penerbangan, efisiensi dapat didorong melalui perencanaan jadwal yang lebih dini, konsolidasi kebutuhan kursi, evaluasi biaya per rute, ketepatan waktu, kapasitas bagasi, dan kesiapan layanan bagi jemaah rentan. Pada transportasi darat, efisiensi dapat diperkuat melalui pemetaan rute, manajemen armada, integrasi jadwal, pemantauan pergerakan, dan standar respons di titik padat.

Pada akomodasi, efisiensi perlu melihat kombinasi antara jarak, aksesibilitas, kapasitas lift, kelayakan

dilakukan semakin transparan, kompetitif, dan berbasis ukuran kinerja yang jelas. Komponen airline, transportasi, akomodasi, dan catering merupakan bagian besar dari struktur biaya haji. Karena itu, setiap perbaikan kecil pada komponen-komponen tersebut dapat memberi dampak signifikan terhadap total BPIH.

kamar, ruang ibadah, keselamatan bangunan, dan harga. Pada catering, ukuran efisiensi bukan sekadar harga per porsi, tetapi juga kecukupan gizi, ketepatan distribusi, variasi menu, higienitas, dan rendahnya tingkat keluhan.

Transparansi dalam konteks ini bukanlah tuduhan terhadap pihak mana pun. Transparansi justru merupakan instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik, melindungi pengambil keputusan, dan memastikan bahwa setiap

Dengan pendekatan tersebut, penurunan BPIH tidak dilakukan dengan mengorbankan kualitas layanan. Efisiensi yang sehat adalah efisiensi yang mengurangi pemborosan, memperkuat perencanaan, meningkatkan daya tawar, memperbaiki pengawasan, dan memastikan penyedia layanan bekerja sesuai standar. Bagi publik, proses yang

terbuka akan membantu menjelaskan mengapa suatu harga dianggap wajar, mengapa suatu penyedia dipilih, dan bagaimana kualitasnya dievaluasi.

Kolaborasi sebagai Kunci

Tidak ada satu pihak pun yang dapat menyelesaikan tantangan ini sendirian. Penyelenggara haji, pengelola keuangan haji, lembaga pengawas, regulator, penyedia layanan, perbankan syariah, pelaku teknologi, asosiasi perjalanan, dan perwakilan jemaah perlu duduk dalam semangat yang sama: menjaga kemabruran layanan, keberlanjutan dana, dan keadilan antar generasi.

dikelola lebih baik oleh pelaku nasional yang profesional, manfaatnya bukan hanya menurunkan tekanan biaya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri halal, dan meningkatkan kemandirian layanan umat.

Pada akhirnya, pembicaraan tentang BPIH bukan semata-mata tentang angka yang dibayar jemaah pada satu musim haji. Ini adalah pembicaraan tentang tata kelola amanah umat dalam rentang waktu yang panjang. Kita ingin biaya tetap terjangkau, tetapi kita juga ingin layanan terus membaik. Kita ingin jemaah hari ini terbantu, tetapi kita juga ingin jemaah tunggu di masa depan tidak menanggung beban yang tidak adil.



Karena itu, jalan keluarnya adalah kedewasaan kolektif. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang terbuka mengenai struktur biaya dan batas kemampuan nilai manfaat. Para penyelenggara dan pengelola perlu terus memperkuat efisiensi dan transparansi. Para mitra layanan perlu dinilai secara objektif berdasarkan harga, kualitas, dan kinerja.

Teknologi perlu dijadikan tulang punggung integrasi lintas instansi. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga semangat kolaborasi, karena ibadah yang suci ini membutuhkan sistem yang kokoh, adil, dan berkelanjutan.

Apabila nama lembaga seperti Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, DPR, otoritas penerbangan, atau mitra layanan disebut, penyebutannya sebaiknya selalu diletakkan dalam kerangka ajakan untuk bersinergi, bukan sebagai beban kesalahan sepihak.

Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada beberapa agenda bersama. Pertama, membangun peta jalan efisiensi BPIH berbasis data. Kedua, menyusun standar transparansi pemilihan penyedia layanan utama. Ketiga, mengintegrasikan sistem informasi haji dan umrah agar perencanaan lebih presisi. Keempat, memperkuat manajemen risiko nilai tukar dan investasi. Kelima, mengembangkan peluang ekonomi haji-umrah yang dapat memberi nilai tambah bagi jemaah dan ekonomi nasional.

Ekosistem haji dan umrah sesungguhnya merupakan ruang ekonomi yang sangat besar. Di dalamnya terdapat kebutuhan transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan, kesehatan, pembiayaan, asuransi, teknologi, edukasi, dan layanan pendampingan.

Apabila sebagian nilai tambah dari ekosistem ini dapat



BPKH SALURKAN BANTUAN RENOVASI FASILITAS ASRAMA HAJI EMBARKASI SURABAYA UNTUK KENYAMANAN DAN KESELAMATAN JEMAAH

Perjalanan ibadah haji tidak dimulai saat jemaah tiba di Tanah Suci, melainkan sejak mereka memasuki asrama haji embarkasi. Di tempat inilah para calon jemaah menjalani berbagai proses persiapan sebelum berangkat menuju Makkah. Karena itu, kenyamanan dan keamanan fasilitas asrama menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan haji.

Berangkat dari semangat tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan Dana Abadi Umat melalui program kemaslahatan untuk merenovasi sejumlah fasilitas di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan Dana Abadi Umat guna meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Renovasi dilakukan pada berbagai fasilitas yang telah mengalami penurunan kondisi akibat usia bangunan. Perbaikan mencakup renovasi kamar yang mengalami kerusakan berat, perbaikan plafon yang rawan ambruk karena rayap, hingga penggantian toilet jongkok menjadi toilet duduk yang lebih ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Hary Alexander, menjelaskan bahwa Dana Abadi Umat dikelola untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

dekade 1970-an membutuhkan berbagai pembaruan agar tetap mampu memberikan pelayanan yang optimal. Menurutnya, dukungan BPKH memungkinkan sejumlah fasilitas penting diperbaiki sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah semakin meningkat.



“Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH memiliki komitmen kuat untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam pelayanan ibadah haji. Renovasi fasilitas di Embarkasi Surabaya diharapkan dapat menambah rasa aman dan nyaman bagi jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci,” ujarnya saat meninjau Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Fentin Istifa'iyah, menyampaikan bahwa bangunan asrama yang telah beroperasi sejak

Program renovasi ini bertepatan dengan dimulainya penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M melalui keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama dari Embarkasi Surabaya. Kehadiran fasilitas yang lebih layak diharapkan memberikan pengalaman awal yang nyaman bagi para jemaah sebelum memulai perjalanan spiritual menuju Tanah Suci.

Melalui program kemaslahatan Dana Abadi Umat, BPKH terus menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi umat. Tidak hanya melalui pengelolaan keuangan haji yang profesional dan sesuai prinsip syariah, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sarana pelayanan yang secara langsung mendukung kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia.

DARI HUNIAN KE KEMANDIRIAN, BPKH BANGUN EKONOMI PRODUKTIF DI KAMPUNG HAJI SIGI



Pemberdayaan umat tidak hanya diwujudkan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui upaya membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Semangat itulah yang melandasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan Program Semarak Kewirausahaan Kampung Haji BPKH Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari Program Berkah Ramadan 1447 H.

Melalui program ini, masyarakat mendapatkan pelatihan pembibitan kakao, pengelolaan nursery, serta dukungan sarana dan prasarana usaha. BPKH juga membangun rumah

pembibitan kakao yang diharapkan menjadi pusat pengembangan bibit unggul sekaligus penggerak ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk optimalisasi nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BPKH untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami berharap program ini tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu membangun semangat kemandirian dan memperkuat ketahanan ekonomi warga. Melalui pembibitan kakao ini, kami ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Sigi," ujarnya.

Program ini juga menjadi kelanjutan dari pembangunan Kampung Haji BPKH Sigi, kawasan hunian yang dibangun BPKH

bersama Rumah Zakat bagi masyarakat terdampak gempa, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah pada 2018. Setelah menghadirkan hunian yang layak, kini fokus pengembangannya diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat agar mampu tumbuh secara mandiri.

Melalui pengelolaan Dana Abadi Umat yang profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah, BPKH terus menghadirkan berbagai program kemaslahatan yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Kampung Haji BPKH Sigi menjadi salah satu contoh bagaimana dana

umat dapat dioptimalkan untuk membangun masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.





DANA ABADI UMAT HADIRKAN KENYAMANAN BAGI JEMAAH HAJI SUMATERA UTARA

Kenyamanan jemaah haji tidak hanya ditentukan saat berada di Tanah Suci, tetapi juga sejak menjalani proses persiapan di embarkasi. Berangkat dari semangat tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan bantuan kemaslahatan senilai Rp1,77 miliar melalui Dana Abadi Umat (DAU) untuk meningkatkan fasilitas pelayanan jemaah haji di Sumatera Utara.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk renovasi asrama haji serta penyediaan shuttle golf car yang memudahkan mobilitas jemaah, khususnya lanjut usia dan penyandang disabilitas, selama berada di embarkasi. Kehadiran fasilitas ini

diharapkan dapat mengurangi kelelahan jemaah sehingga mereka dapat memulai perjalanan menuju Tanah Suci dalam kondisi yang lebih prima.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Indra Gunawan, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud optimalisasi nilai manfaat Dana Abadi Umat yang dikelola secara profesional untuk memberikan kemaslahatan bagi umat.

“Melalui optimalisasi Dana Abadi Umat ini, kami berharap pelayanan kepada para tamu Allah semakin meningkat. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan sejak berangkat hingga

kembali ke Tanah Air serta meraih haji yang mabrur,” ujarnya.

Program ini menjadi bukti bahwa manfaat pengelolaan Dana Abadi Umat tidak berhenti pada aspek keuangan, tetapi juga diwujudkan dalam peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji. Dengan prinsip transparansi, profesionalitas, dan sesuai syariah, BPKH terus memastikan bahwa setiap nilai manfaat yang dihasilkan dapat kembali dirasakan oleh masyarakat. Melalui berbagai program kemaslahatan seperti ini, semangat “dari umat, kembali untuk umat” terus diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia.



MENEBAR KEBAIKAN HINGGA PELOSOK NEGERI



Iduladha selalu menjadi momentum berbagi, namun bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), makna kurban melampaui sekadar penyaluran hewan. Melalui Program Sedekah Kurban BPKH 1447 H/2026 M bertema "Menebar Kebajikan, Menggapai Keberkahan", BPKH kembali menghadirkan manfaat yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok Indonesia.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2020, program ini berkembang menjadi salah satu program kemaslahatan unggulan BPKH. Tidak

hanya memastikan daging kurban diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, program ini juga dirancang untuk memberdayakan peternak lokal, memperkuat ekonomi umat, mendukung ketahanan pangan, serta menggerakkan pelaku UMKM yang terlibat dalam proses distribusi dan pengemasan.

Pada tahun 2026, BPKH bersama 11 mitra kemaslahatan menargetkan penyaluran 600 ekor sapi dan kerbau serta 700 ekor kambing dan domba yang akan didistribusikan ke 38 provinsi. Sasaran utamanya adalah masyarakat di daerah terpencil, terluar, tertinggal, serta wilayah yang terdampak bencana, sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih merata.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen BPKH untuk menghadirkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Melalui program ini, kami berharap kebaikan dari ibadah kurban

dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri. Kurban bukan hanya tentang memberi, tetapi juga menghadirkan harapan, menguatkan kepedulian, dan memastikan manfaatnya menjangkau hingga pelosok Indonesia," ujarnya.

Program Sedekah Kurban BPKH didanai dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BPKH, bukan dari dana setoran awal jemaah haji. Seluruh penyalurannya dilaksanakan sesuai prinsip syariah, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian, sehingga manfaat pengelolaan Dana Abadi Umat benar-benar kembali kepada masyarakat. Melalui semangat berbagi dan gotong royong, BPKH berharap program ini tidak hanya menghadirkan kebahagiaan pada Hari Raya Iduladha, tetapi juga memperkuat kesejahteraan dan solidaritas sosial di berbagai penjuru negeri.



SERBA SERBI KURBAN



Setiap memasuki bulan Zulhijah, umat muslim di seluruh dunia bersiap menyambut salah satu momen paling istimewa dalam kalender Islam: Iduladha. Di balik gema takbir dan tradisi penyembelihan hewan kurban, tersimpan makna mendalam tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama.

Kurban bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah simbol ketundukan manusia kepada Allah SWT, sekaligus pengingat bahwa dalam hidup, ada kalanya seseorang perlu melepaskan sesuatu yang dicintai demi kebaikan yang lebih besar.

Makna Kurban: Mendekatkan Diri kepada Allah

Kata “kurban” berasal dari bahasa Arab qurban, yang berakar dari kata qurb, berarti “kedekatan”. Dari makna tersebut, kurban sejatinya menjadi jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tradisi ini merujuk pada kisah Nabi Ibrahim AS yang dengan penuh keimanan bersedia menjalankan perintah Allah SWT untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS. Namun, atas kehendak Allah SWT, pengorbanan tersebut digantikan dengan seekor domba.



Kapan Kurban Dilaksanakan?

Penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah salat Iduladha pada 10 Zulhijah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah. Tahun ini, bulan Zulhijah diperkirakan dimulai pada 17 Mei 2026, sementara Iduladha jatuh pada malam 26 Mei 2026, bergantung pada hasil rukyatul hilal atau pemantauan bulan.

Momen ini juga bertepatan dengan sepuluh hari pertama Zulhijah yang dikenal sebagai hari-hari terbaik dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai Allah dibanding sepuluh hari tersebut.

Di antara hari istimewa itu terdapat Hari Arafah,

yang dikenal sebagai salah satu hari paling mulia dalam setahun. Puasa Arafah bahkan diyakini dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.

Hewan Kurban dan Filosofi Kepedulian

Hewan yang dapat dijadikan kurban antara lain kambing, domba, sapi, dan unta, dengan syarat tertentu terkait usia dan kondisi kesehatan. Hewan harus sehat, cukup umur, serta tidak memiliki cacat.



Namun lebih dari sekadar pemenuhan syariat, kurban juga mengandung dimensi sosial yang kuat. Daging kurban



secara tradisional dibagi menjadi tiga bagian: untuk keluarga yang berkurban, kerabat atau teman, serta masyarakat yang membutuhkan.

Di berbagai belahan dunia, kurban menjadi salah satu momen penting untuk memperkuat solidaritas

sosial. Banyak keluarga yang mungkin jarang menikmati hidangan bergizi, dapat merasakan kebahagiaan Iduladha melalui pembagian daging kurban.

Sunnah Berkurban: Berbagi untuk Mereka yang Belum Mampu

Menariknya, Rasulullah SAW tidak hanya berkurban untuk dirinya sendiri, tetapi juga mempersembahkan kurban bagi umat Muslim yang belum mampu melakukannya. Praktik ini dikenal sebagai Sunnah Qurban.

Nilai yang diajarkan begitu sederhana namun mendalam: kebahagiaan spiritual sebaiknya tidak dinikmati sendirian. Ada semangat berbagi agar semakin banyak orang dapat merasakan keberkahan Iduladha.

Dalam konteks masa kini, semangat tersebut terasa semakin relevan dimana momentum berkurban juga menghadirkan

rasa peduli sesama masyarakat.

Fakta Menarik: Domba dari Surga

Dalam tradisi Islam, hewan yang digunakan Nabi Ibrahim AS sebagai pengganti Nabi Ismail AS diyakini merupakan seekor domba dari surga. Dalam riwayat Ibnu Abbas RA disebutkan bahwa domba tersebut telah merumput di surga selama empat puluh tahun.

Yang lebih menarik, tanduk domba itu konon diwariskan turun-temurun dan pernah disimpan di Ka'bah oleh kaum Quraisy sebagai peninggalan penting. Tanduk tersebut tetap berada di Ka'bah hingga akhirnya hilang akibat kebakaran saat peristiwa pengepungan Makkah pada tahun 683 M.





MEMAHAMI DAM DALAM IBADAH HAJI

Di tengah jutaan langkah yang mengalir menuju Tanah Suci setiap musim haji, ada satu istilah fikih yang kerap terdengar di kalangan jemaah: dam. Bagi sebagian orang, dam identik dengan “denda” karena melanggar aturan ihram. Namun dalam praktik ibadah haji, maknanya jauh lebih luas dari sekadar hukuman. Dam merupakan bagian dari mekanisme syariat untuk menjaga kesempurnaan ibadah, memperbaiki kekurangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab spiritual seorang jemaah atas ritual yang dijalanakan.

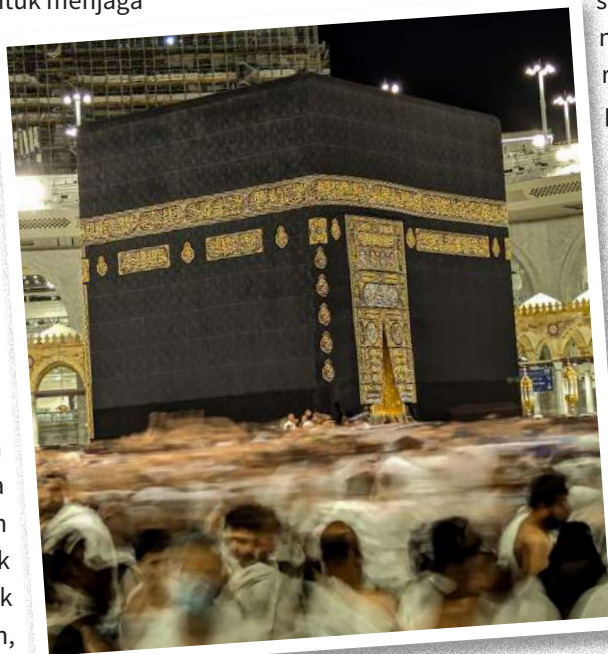
Dalam bahasa Arab, dam berkaitan dengan makna darah, yang kemudian dipahami sebagai penyembelihan hewan kurban dalam konteks ibadah haji dan umrah. Pelaksanaannya dilakukan di wilayah haram Makkah sebagai bentuk penyempurna ibadah, baik karena adanya pelanggaran, meninggalkan kewajiban tertentu, maupun sebagai bagian dari ketentuan manasik itu sendiri seperti pada haji tamattu’ dan haji qiran.

Al-Qur’an membahas persoalan ini dalam firman Allah SWT: “Fa-mastaysara mina al-hady” — “Maka sembelihlah hewan

kurban yang mudah didapat.” Ayat ini menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan fikih terkait dam dan hady dalam ibadah haji.

Dalam praktiknya, dam menjadi wajib dalam beberapa kondisi. Salah satu yang paling umum adalah pelanggaran saat berihram. Misalnya menggunakan parfum, memotong rambut atau kuku, mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki, hingga menutup kepala dalam keadaan ihram. Namun, tidak semua pelanggaran memiliki konsekuensi yang sama. Ada kesalahan yang mewajibkan dam penuh berupa penyembelihan hewan, ada pula yang cukup ditebus dengan sedekah. Faktor seperti unsur ketidaksengajaan, lupa, atau keadaan darurat juga menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hukumnya.

Selain pelanggaran ihram, dam juga dapat dikenakan ketika seorang jemaah meninggalkan kewajiban tertentu dalam haji. Contoh yang sering dibahas para ulama adalah melewati miqat tanpa ihram dan tidak kembali untuk memperbaikinya, meninggalkan thawaf wada’, atau tidak menyempurnakan beberapa rangkaian wajib sesuai ketentuan mazhab yang dianut. Karena itu, para pembimbing ibadah selalu mengingatkan agar jemaah



tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hukum hanya dari potongan informasi di media sosial tanpa berkonsultasi kepada pembimbing atau ulama yang memahami fikih haji secara utuh.

Tidak semua pelanggaran berujung pada dam penuh. Dalam fikih, ada kategori pelanggaran ringan yang cukup ditebus dengan sedekah. Misalnya penggunaan wewangian dalam jumlah kecil, memotong sebagian kecil kuku atau rambut, atau pelanggaran ihram yang berlangsung sangat singkat. Sebaliknya, pelanggaran yang lebih besar seperti melewati miqat tanpa ihram atau pelanggaran ihram yang dilakukan secara penuh dan sengaja dapat mewajibkan dam berupa penyembelihan hewan.

Dalam kondisi tertentu, konsekuensi hukum bahkan bisa lebih berat lagi. Beberapa pelanggaran serius dalam haji dapat melibatkan lebih dari satu bentuk kompensasi, termasuk pengulangan ibadah tertentu. Karena itu, para ulama selalu menekankan pentingnya kehati-hatian dan pendampingan manasik yang memadai bagi jemaah.

Hewan yang digunakan untuk dam juga memiliki ketentuan khusus. Umumnya berupa kambing atau domba, dan dalam beberapa jenis dam dapat pula berupa bagian dari sapi atau unta. Dalam sebagian pendapat fikih, satu ekor sapi atau unta dapat dibagi untuk tujuh orang.

dam, selama masih berada dalam batas Tanah Haram. Saat ini, pengelolaan dam semakin modern dan tertata melalui sistem resmi pemerintah Arab Saudi, perbankan syariah, maupun layanan voucher penyembelihan yang memudahkan jemaah. Daging hasil dam kemudian didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan.

Bagi jemaah Indonesia, pemahaman mengenai dam menjadi penting bukan untuk menambah rasa takut saat berhaji, melainkan agar ibadah dapat dijalankan dengan lebih tenang dan penuh kehati-hatian. Sebab pada akhirnya, haji bukan hanya perjalanan fisik menuju Tanah Suci, tetapi juga perjalanan spiritual untuk belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan Allah SWT.



Namun penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan jenis dam dan ketentuan mazhab yang diikuti. Hewan yang disembelih pun harus memenuhi syarat layak kurban, sehat, dan tidak cacat.

Pelaksanaan dam wajib dilakukan di wilayah haram Makkah. Karena itu, lokasi seperti Makkah, Mina, dan Muzdalifah sering disebut dalam praktik penyembelihan



TRANSFORMASI PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA: DARI SISTEM SYEKH HINGGA MANAJEMEN ASET MODERN





Pengelolaan dana haji di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang selama lebih dari 150 tahun. Dari sistem yang sepenuhnya berbasis kepercayaan personal pada masa kolonial, kini Indonesia mengelola dana ratusan triliun rupiah melalui manajemen aset yang mutakhir dan akuntabel.

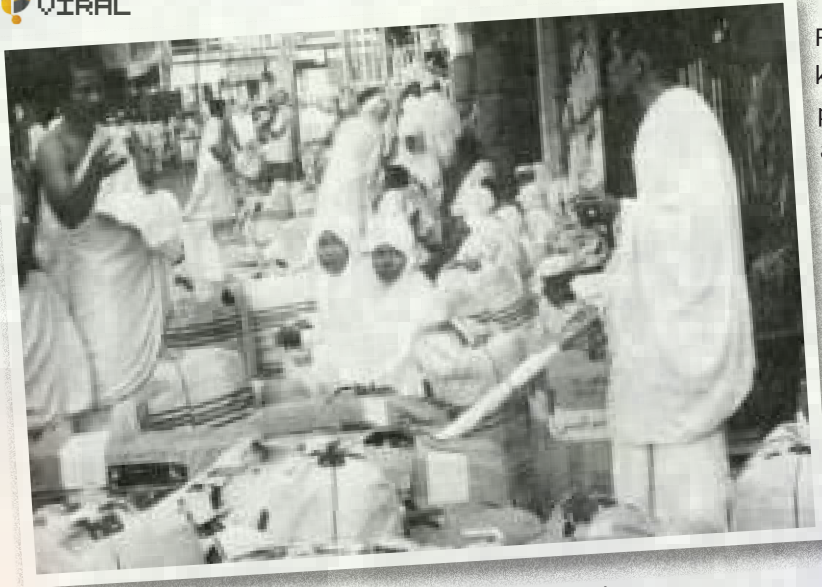
Era Syekh dan Monopoli Kepercayaan

Pada akhir abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1880-an, penyelenggaraan haji di Nusantara dikendalikan oleh sosok yang disebut syekh. Mereka adalah perantara kunci yang mengurus segala keperluan jemaah, mulai dari tiket kapal uap, pemondokan di Makkah, hingga bimbingan manasik.

Sistem ini merupakan jaringan bisnis transnasional yang telah berjalan sejak abad ke-17. Para calon jemaah menyerahkan seluruh harta benda mereka—tabungan bertahun-tahun, surat tanah, hingga perhiasan—kepada syekh tanpa adanya akad tertulis, laporan keuangan, maupun audit. Semuanya murni hanya berlandaskan rasa saling percaya.

Masalah Tanpa Pengawasan

Ketiadaan pengawasan membuat sistem ini rentan terhadap penyalahgunaan. Laporan kolonial tahun 1870-an hingga 1890-an mencatat berbagai kisah pilu: jemaah yang terlantar di Jeddah karena dana dibawa kabur syekh, pemondokan yang ternyata hanya gubuk berlantai tanah, hingga jemaah yang meninggal di Hijaz tanpa kabar kepada keluarga di



Jawa.

Data tahun 1890 menunjukkan bahwa sekitar 5–15% dari jemaah haji menghadapi masalah finansial serius selama perjalanan akibat pengelolaan dana yang tidak akuntabel.

Pemerintah Hindia Belanda akhirnya bertindak pada tahun 1898 dengan menerbitkan *Pelgrims Ordonnantie*. Regulasi pertama ini mewajibkan jemaah membuktikan kecukupan dana sebelum berangkat dan mengharuskan agen perjalanan mendaftar ke otoritas kolonial.

Tantangan Pasca-Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengelolaan haji beralih ke tangan Kementerian Agama (Kemenag). Namun, muncul masalah tata kelola baru di mana Kemenag memegang terlalu banyak peran sekaligus: sebagai regulator, pengawas, eksekutor operasional, sekaligus bendahara yang menyimpan dana.

Situasi ini bertahan selama beberapa dekade tanpa mekanisme koreksi yang memadai. Dana setoran awal jemaah terus menumpuk tanpa adanya lembaga khusus yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan investasinya. Akibatnya, optimalisasi imbal hasil tidak menjadi prioritas utama karena memang bukan tugas inti Kemenag.

Titik Balik: Lahirnya BPKH

Perubahan besar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Langkah legislatif ini secara tegas memisahkan fungsi teknis penyelenggaraan ibadah (tetap di Kemenag) dengan fungsi pengelolaan keuangan (diserahkan ke lembaga otonom).

Dari mandat UU tersebut, lahirlah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai badan hukum publik yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada DPR

RI. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kepentingan jemaah ditempatkan sebagai prioritas tunggal tanpa campur aduk dengan agenda birokrasi kementerian.

Investasi Canggih dan Transparansi Modern

Kini, dana haji tidak lagi "tidur" di bawah sorban atau sekadar mengendap di deposito biasa. BPKH menginvestasikan dana tersebut ke dalam instrumen syariah pilihan seperti sukuk negara, reksa dana syariah, dan instrumen pasar modal lainnya. Sejak 2018, BPKH mencatatkan *Return on Asset (ROA)* sekitar 6,8% per tahun.

Beberapa dampak nyata dari pengelolaan modern ini antara lain:

- **Subsidi Investasi:** Hasil investasi BPKH menanggung sekitar Rp33 juta dari biaya keberangkatan setiap jemaah, sehingga jemaah tidak perlu membayar penuh biaya riil haji.
- **Virtual Account:** Sekitar 5,5 juta jemaah dalam daftar tunggu kini memiliki *Virtual Account* aktif. Hasil kelolaan dana didistribusikan langsung ke akun masing-masing jemaah, sehingga uang mereka terus "bekerja" selama masa penantian.
- **Efisiensi Operasional:** Biaya operasional BPKH dibatasi maksimal 5% dari nilai manfaat yang dihasilkan, dan 0% menggunakan dana APBN

Kesimpulan

Perjalanan 150 tahun ini memberikan pelajaran berharga bahwa amanah keuangan umat membutuhkan lebih dari sekadar niat baik; ia membutuhkan arsitektur kelembagaan yang kuat, pemisahan fungsi yang tegas, dan budaya akuntabilitas yang tidak bisa ditawar. BPKH hadir sebagai jawaban atas tantangan sejarah tersebut untuk menjaga bekal perjalanan paling sakral bagi Muslim Nusantara.



PENGELOLAAN DANA HAJI RI TUMBUH PROGRESIF DI TANGAN BPKH

Di tengah tren kenaikan biaya haji global, BPKH terus bergerak progresif. Lembaga ini mengoptimalkan dana umat demi jaga likuiditas, keberlanjutan pembiayaan, serta memastikan nilai manfaat mengalir tepat guna.

LEBIH MUDA, LEBIH PROGRESIF

| Indonesia (BPKH) | | Malaysia (Tabung Haji) | |
|------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| Rp238,9 triliun | Total aset | Rp442,29 triliun | |
| Rp180,7 triliun | Dana kelolaan/liabiliti | Rp429,05 triliun | |
| 8,12% | Pertumbuhan aset | 3,7% | |
| 6,86% (p.a) | Yield/return | 3,5% | |
| Rp12,09 triliun | Nilai manfaat /total distribusi | Rp14,44 triliun | |

Tabung Haji Malaysia mengelola dana lebih besar karena telah berdiri sejak tahun 1963. Namun, BPKH unggul dari sisi kecepatan tumbuh dan efektivitas investasi.

POTRET TATA KELOLA HAJI DUNIA

| INDONESIA | SINGAPURA | MALAYSIA |
|--|--|---|
| ANTREAN HAJI 26 tahun 5,6 juta jemaah | ANTREAN HAJI 34 tahun 54.000 jemaah | ANTREAN HAJI 143 tahun 3,8 juta jemaah |
| KUOTA HAJI 221.000 jemaah | KUOTA HAJI 900 jemaah | KUOTA HAJI 31.600 jemaah |
| BIAYA HAJI* Rp87,41 juta | BIAYA HAJI* Rp165 juta - Rp348 juta | BIAYA HAJI* Rp67,29 juta - Rp149,39 juta |
| SISTEM SUBSIDI Subsidi nilai manfaat | SISTEM SUBSIDI Tanpa subsidi | SISTEM SUBSIDI Subsidi bertingkat |
| KARAKTERISTIK LAYANAN Paket terstandar | KARAKTERISTIK LAYANAN Dikelola swasta | KARAKTERISTIK LAYANAN Fasilitas sesuai |



Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940